



**Pengadilan Negeri
Banyumas**

Jl. Pramuka No.9 Sudagaran Banyumas

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya Pengadilan Negeri Banyumas telah berhasil menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dengan baik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan pula terima kasih yang sebesar - besarnya kepada pihak – pihak yang telah mendukung Pengadilan Negeri Banyumas dalam menyusun Laporan ini.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan periode tahun 2023 dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Banyumas yang merupakan salah satu lembaga peradilan yang wilayah hukumnya meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyumas , untuk memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 serta untuk memperoleh data kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas dalam satu tahun. Disamping memuat informasi tentang pelaksanaan program kerja dibidang pembinaan, laporan ini juga menyajikan informasi tentang kegiatan pengelolaan organisasi maupun bidang administrasi dalam tahun 2023.

Agar Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat bermanfaat secara optimal, maka kami mengharap kritik dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan laporan untuk periode tahun berikutnya dan lebih lanjut mohon dipertimbangkan atas usulan yang kami ajukan.

Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,

Asyrotun Mugiastuti



DAFTAR ISI

Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II	
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....	5
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	5
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	14
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	18
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	23
B. Penyelesaian Perkara.....	29
1. Jumlah sisa perkara yang putus.....	29
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	30
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.....	31
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil melalui mediasi.....	33
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	33
C. Capaian Prioritas Nasional.....	34
1. Posbakum.....	34
2. Sidang keliling/Pelayanan Terpadu.....	35
3. Perkara prodeo (pembebasan Biaya Perkara).....	35
BAB III Sumber Daya Manusia Komposisi SDM	
berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan.....	36
1. Mutasi.....	40
2. Promosi.....	41
3. Pensiun.....	41
4. Diklat.....	42
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan.....	47
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	49
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	65
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	68
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	68
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	69
BAB VI Pengawasan	
A. Internal.....	85
B. Evaluasi.....	86
BAB VII Penutup	
A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi.....	87

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, proses penegakan hukum yang dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat menjadi sebuah tantangan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi.

Untuk memenuhi tantangan pada proses penegakan hukum maka secara total pembenahan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) harus terus menerus dilakukan. Pembenahan yang dimaksud merupakan pembenahan pada aspek Sumber Daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Hakikat dari bentuk pembenahan tersebut adalah kesadaran bahwa keberadaan peradilan umum dan peradilan-peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung RI dalam fungsi yudikatif adalah membangun profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Peradilan Umum sebagai barisan terdepan Mahkamah Agung yang merupakan bagian dari badan publik dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan harapan dan tuntutan publik. Secara umum, ada sejumlah poin harapan publik terhadap pelayanan pengadilan. Pertama, perkaranya bisa diselesaikan dengan cepat. Kedua, tahapan penyelesaian perkara bisa diakses dengan mudah oleh publik. Ketiga, akses terhadap keadilan bisa dicapai oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan marginal.

Mewujudkan pelayanan masyarakat sebagaimana harapan ideal adalah tidak mudah, akan tetapi secara bertahap dan semaksimal mungkin pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat harus diimplementasikan. Upaya mewujudkan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan. Hal ini dilakukan seiring berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sudah bukan hal baru pada saat ini apabila seluruh pengadilan telah mempunyai website resmi. Website resmi pengadilan tersebut memiliki tujuan utama mewujudkan akses informasi publik. Bentuk dari kesungguhan Mahkamah Agung dalam rangka keterbukaan informasi adalah dengan telah dibangunnya Aplikasi Sistem Administrasi Perkara pada beberapa pengadilan. Aplikasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi perkara pada pengadilan-pengadilan, tetapi juga dalam rangka secara khusus memfasilitasi masyarakat pencari keadilan yang sedang beracara dan masyarakat pada umumnya terhadap proses perkara secara dengan pembaharuan informasi terkini.

B. VISI DAN MISI

B.1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas yang Agung”

B.2. Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banyumas
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banyumas
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banyumas

C. TUJUAN DAN SASARAN

C.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Banyumas.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK).
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
 - a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 - b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
 - a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 - b. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

C.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Trasnparan dan Akuntabel
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.
 - f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

BAB II

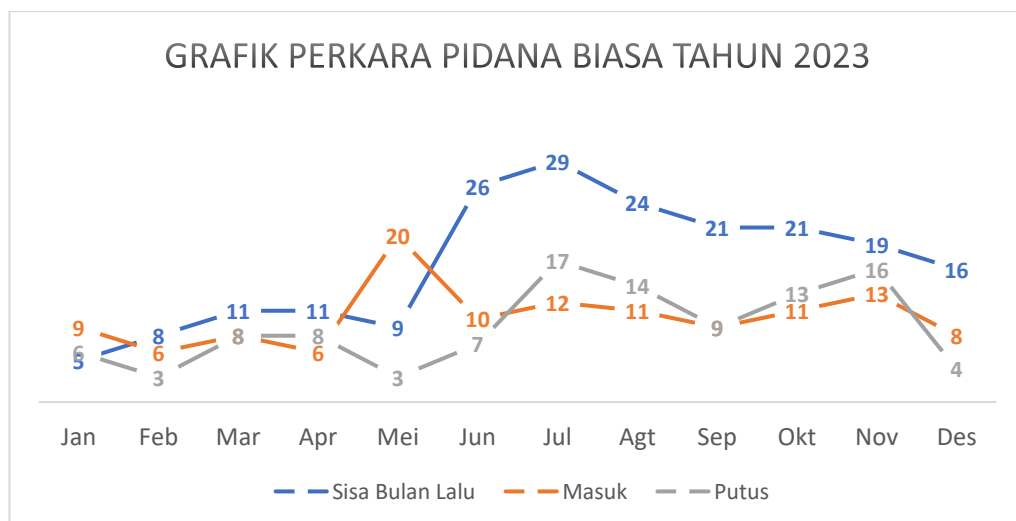
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

a. Pidana

PIDANA BIASA				
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Januari	5	9	6	8
Februari	8	6	3	11
Maret	11	8	8	11
April	11	6	8	9
Mei	9	20	3	26
Juni	26	10	7	29
Juli	29	12	17	24
Agustus	24	11	14	21
September	21	9	9	21
Oktober	21	11	13	19
November	19	13	16	16
Desember	16	8	4	20
Jumlah		123	108	

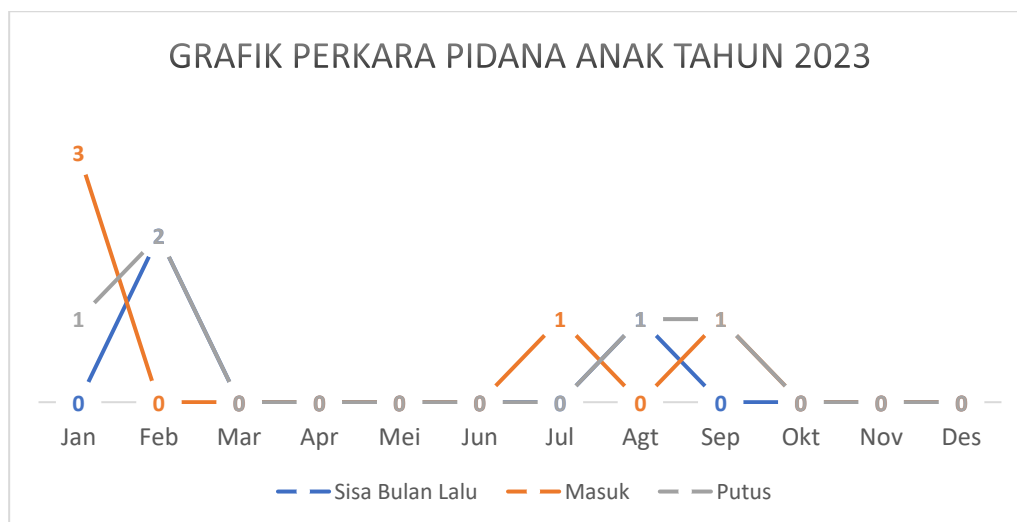
Tabel 1. Perkara Pidana Biasa Tahun 2023



Grafik 1. Perkara Pidana Biasa Tahun 2023

PIDANA ANAK				
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Januari	0	3	1	2
Februari	2	0	2	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	1	0	1
Agustus	1	0	1	0
September	0	1	1	0
Oktober	0	0	0	0
November	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Jumlah		5	5	

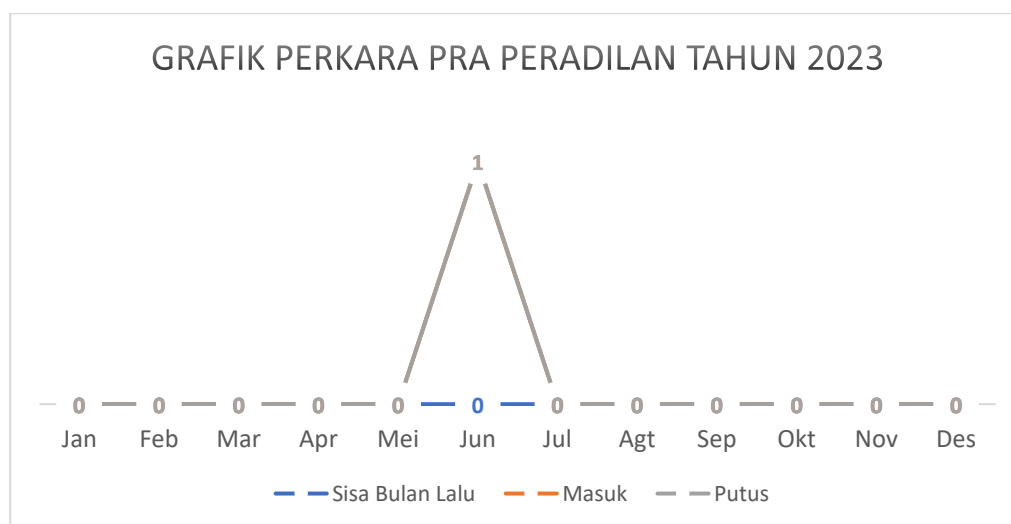
Tabel 2. Perkara Pidana Anak Tahun 2023



Grafik 2. Perkara Pidana Anak Tahun 2023

PRA PERADILAN				
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	1	1	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0
November	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Jumlah		1	1	

Tabel 3. Perkara Pra Peradilan Tahun 2023



Grafik 3. Perkara Pra Peradilan Tahun 2023

PIDANA CEPAT				
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	2	2	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	1	1	0
Oktober	0	0	0	0
November	0	0	0	0
Desember	0	4	4	0
Jumlah		7	7	

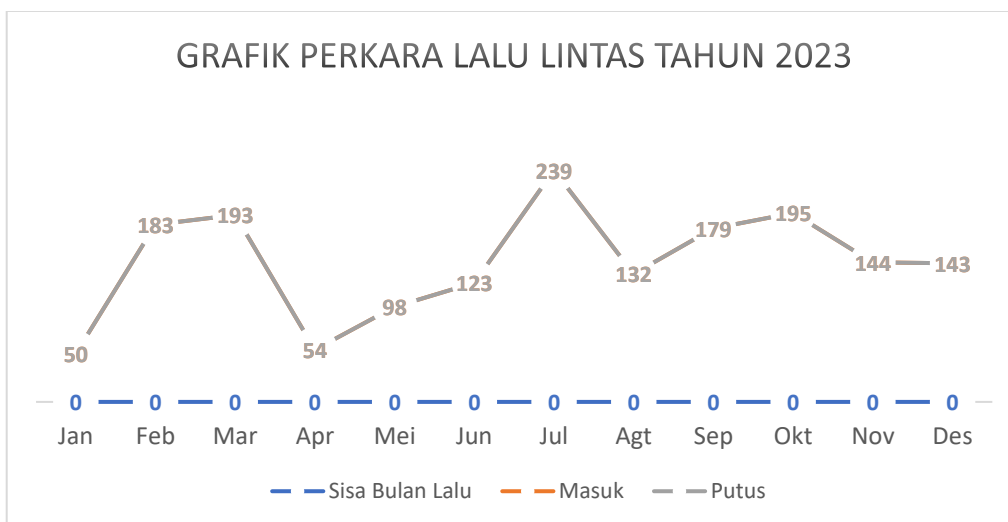
Tabel 4. Perkara Pidana Cepat Tahun 2023



Grafik 4. Perkara Pidana Cepat Tahun 2023

PERKARA LALU-LINTAS				
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Januari	0	50	50	0
Februari	0	183	183	0
Maret	0	193	193	0
April	0	54	54	0
Mei	0	98	98	0
Juni	0	123	123	0
Juli	0	239	239	0
Agustus	0	132	132	0
September	0	179	179	0
Oktober	0	195	195	0
November	0	144	144	0
Desember	0	143	143	0
Jumlah		1733	1733	

Tabel 5. Perkara Lalu lintas Tahun 2023

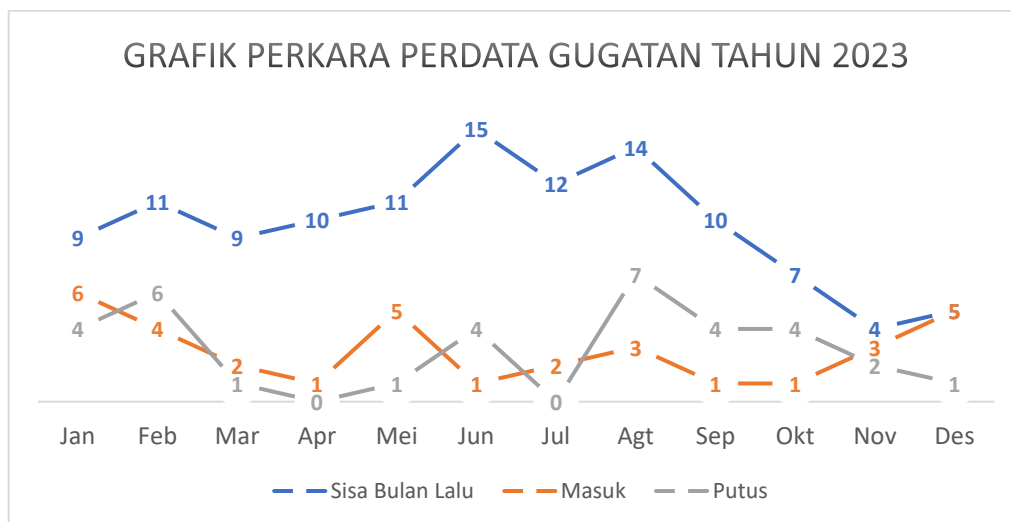


Grafik 5. Perkara Lalu lintas Tahun 2023

b. Perdata

PERDATA GUGATAN				
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Januari	9	6	4	11
Februari	11	4	6	9
Maret	9	2	1	10
April	10	1	0	11
Mei	11	5	1	15
Juni	15	1	4	12
Juli	12	2	0	14
Agustus	14	3	7	10
September	10	1	4	7
Oktober	7	1	4	4
November	4	3	2	5
Desember	5	5	1	9
Jumlah		34	34	

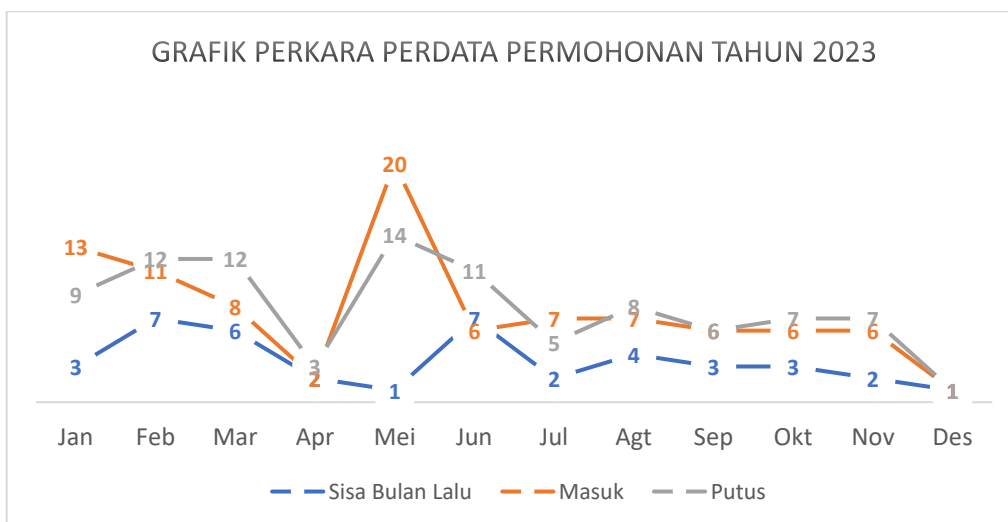
Tabel 6. Perkara Perdata Gugatan Tahun 2023



Grafik 6. Perkara Perdata Gugatan Tahun 2023

PERDATA PERMOHONAN				
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Januari	3	13	9	7
Februari	7	11	12	6
Maret	6	8	12	2
April	2	2	3	1
Mei	1	20	14	7
Juni	7	6	11	2
Juli	2	7	5	4
Agustus	4	7	8	3
September	3	6	6	3
Oktober	3	6	7	2
November	2	6	7	1
Desember	1	1	1	1
Jumlah		93	95	

Tabel 7. Data Perkara perdata Permohonan tahun 2023



Grafik 7. Perkara Perdata Permohonan Tahun 2023

PERDATA GUGATAN SEDERHANA				
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Januari	0	1	0	1
Februari	1	0	1	0
Maret	0	0	0	0
April	0	1	0	1
Mei	1	2	0	3
Juni	3	6	5	4
Juli	4	0	4	0
Agustus	0	1	1	0
September	0	0	0	0
Oktober	0	2	0	2
November	2	1	2	1
Desember	1	0	1	0
Jumlah		14	14	

Tabel 8. Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2023



Grafik 8. Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2023

c. Rekapitulasi Perkara Pidana Tingkat Pertama

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Pidana Biasa	5	123	108	20
Pidana Anak	0	5	5	0
Pra Peradilan	0	1	1	0
Pidana Cepat	0	7	7	0
Lalu Lintas	0	1733	1733	0
Jumlah	5	1862	1847	20

Tabel 9. Rekapitulasi Perkara Pidana Tahun 2023

d. Rekapitulasi Perkara Perdata Tingkat Pertama

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
Gugatan	9	34	34	9
Permohonan	3	93	95	1
Gugatan Sederhana	0	14	14	0
Jumlah	12	141	143	10

Tabel 9. Rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2023

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

a. Pidana

PIDANA BIASA						
Bulan	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas	Putusan PT	Belum Putus PT	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemberbanding/ Terbanding
Januari	0	1	1	0	0	0
Februari	1	1	0	1	1	1
Maret	0	0	1	0	1	1
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	1	1	0	1	0	0
Agustus	0	0	1	0	1	1
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	3	3	0	3	3

Tabel 10. Perkara Pidana Biasa Banding Tahun 2023



Grafik 9. Perkara Pidana Biasa Banding Tahun 2023

PIDANA ANAK						
Bulan	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas	Putusan PT	Belum Putus PT	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pembanding/ Terbanding
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 11. Perkara Pidana Anak Banding Tahun 2023



Grafik 10. Perkara Pidana Anak Banding Tahun 2023

b. Perdata

PERDATA GUGATAN						
Bulan	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas	Putusan PT	Belum Putus PT	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemberbanding/ Terbanding
Januari	0	0	0	2	0	0
Februari	1	0	0	3	0	0
Maret	0	1	2	1	1	1
April	0	0	0	1	0	1
Mei	0	0	0	1	0	0
Juni	2	0	0	3	0	0
Juli	0	2	0	3	0	0
Agustus	1	0	2	2	0	2
September	1	1	0	3	0	0
Oktober	1	1	2	2	0	2
November	1	1	0	3	0	0
Desember	0	1	2	1	0	1
Jumlah	7	7	8	1	1	7

Tabel 12. Perkara Perdata Gugatan Banding Tahun 2023



Grafik 11. Perkara Perdata Gugatan Banding Tahun 2023

c. Rekapitulasi Perkara Pidana Tingkat Banding

Perkara	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas	Putusan PT	Belum Putus PT	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pembanding/ Terbanding
Pidana Biasa	2	3	3	0	3	3
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	3	3	0	3	3

Tabel 13. Rekapitulasi Perkara Pidana Banding Tahun 2023

d. Rekapitulasi Perkara Perdata Tingkat Banding

Perkara	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas	Putusan PT	Belum Putus PT	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pembanding/ Terbanding
Perdata Gugatan	7	7	8	1	1	7
Jumlah	7	7	8	1	1	7

Tabel 14. Rekapitulasi Perkara Perdata Banding Tahun 2023

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

a. Pidana

PIDANA BIASA						
Bulan	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	2	2	1
Februari	0	0	0	2	0	0
Maret	0	0	0	2	0	0
April	0	0	1	1	0	1
Mei	0	0	0	1	0	0
Juni	0	0	0	1	0	0
Juli	0	0	0	1	2	0
Agustus	0	0	0	1	0	0
September	0	0	0	1	0	0
Oktober	0	0	0	1	0	0
November	0	0	0	1	0	0
Desember	0	0	0	1	0	0
Jumlah	0	0	1	1	4	2

Tabel 15. Perkara Pidana Biasa Kasasi Tahun 2023



Grafik 12. Perkara Pidana Biasa Kasasi Tahun 2023

PIDANA ANAK						
Bulan	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 16. Perkara Pidana Anak Kasasi Tahun 2023



Grafik 13. Perkara Pidana Anak Kasasi Tahun 2023

b. Perdata

PERDATA GUGATAN						
Bulan	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	2	0	0
Februari	0	0	0	2	1	0
Maret	0	0	0	2	2	3
April	1	0	0	3	0	0
Mei	0	1	0	3	0	0
Juni	0	0	0	3	0	0
Juli	0	0	0	3	0	0
Agustus	1	0	0	4	0	0
September	0	0	0	4	0	0
Oktober	1	1	0	5	0	0
November	1	0	0	6	0	0
Desember	0	1	0	6	0	0
Jumlah	4	3	0	6	3	3

Tabel 17. Perkara Perdata Gugatan Kasasi Tahun 2023

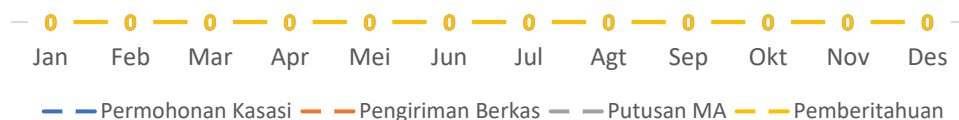


Grafik 14. Perkara Perdata Gugatan Kasasi Tahun 2023

PERDATA PERMOHONAN						
Bulan	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 18. Perkara Perdata Permohonan Kasasi Tahun 2023

GRAFIK PERKARA PERDATA PERMOHONAN KASASI TAHUN 2023



Grafik 15. Perkara Permohonan Kasasi Tahun 2023

c. Rekapitulasi Perkara Pidana Tingkat Kasasi

Perkara	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Pidana Biasa	0	0	1	1	4	2
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	1	1	4	2

Tabel 19. Rekapitulasi Perkara Pidana Kasasi Tahun 2023

d. Rekapitulasi Perkara Perdata Tingkat Kasasi

Perkara	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding
Perdata Gugatan	4	3	0	6	3	3
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4	3	0	6	3	3

Tabel 20. Rekapitulasi Perkara Perdata Kasasi Tahun 2023

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

a. Pidana

PIDANA BIASA						
Bulan	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 21. Perkara Pidana Biasa PK Tahun 2023



Grafik 16. Perkara Pidana Biasa PK Tahun 2023

PIDANA ANAK						
Bulan	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 22. Perkara Pidana Anak PK Tahun 2023



Grafik 17. Perkara Pidana Anak PK Tahun 2023

b. Perdata

PERDATA GUGATAN						
Bulan	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan Maan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 22. Perkara Perdata Gugatan PK Tahun 2023



Grafik 18. Perkara Perdata Gugatan PK Tahun 2023

PERDATA PERMOHONAN						
Bulan	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 22. Perkara Perdata Permohonan PK Tahun 2023



Grafik 18. Perkara Perdata Permohonan PK Tahun 2023

PERDATA GUGATAN SEDERHANA						
Bulan	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 22. Perkara Perdata Gugatan Sederhana PK Tahun 2023



Grafik 18. Perkara Perdata Gugatan Sederhana PK Tahun 2023

c. Rekapitulasi Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Pidana Biasa	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 20. Rekapitulasi Perkara Pidana PK Tahun 2023

d. Rekapitulasi Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara	Permohonan PK	Pengiriman Berkas	Putusan MA	Belum Putus MA	Penerimaan PN	Pemberitahuan Pemohon/Termohon
Perdata Gugatan	0	0	0	0	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 20. Rekapitulasi Perkara Perdata PK Tahun 2023

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

a. Pidana

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2022	Sisa Perkara 2022 yang diputus Tahun 2023	Sisa Perkara 2022 yang belum diputus Tahun 2023
Pidana Biasa	5	5	Nihil
Pidana Anak	0	0	Nihil
Pra Peradilan	0	0	Nihil
Pidana Cepat	0	0	Nihil
Lalu Lintas	0	0	Nihil

Tabel 30. Sisa Perkara Pidana Yang Diputus Tahun 2023

b. Perdata

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2022	Sisa Perkara 2022 yang diputus Tahun 2023	Sisa Perkara 2022 yang belum diputus Tahun 2023
Gugatan	9	9	Nihil
Permohonan	3	3	Nihil
Gugatan Sederhana	0	0	Nihil

Tabel 30. Sisa Perkara Perdata Yang Diputus Tahun 2023

c. Rekapitulasi Sisa Perkara yang Diputus

Perkara	Sisa Perkara 2022	Sisa Perkara 2022 yang diputus Tahun 2023	Sisa Perkara 2022 yang belum diputus Tahun 2023
Pidana	5	5	Nihil
Perdata	12	12	Nihil

Tabel 30. Rekapitulasi Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2023

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

a. Pidana

Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu
Pidana Biasa	108	108	Nihil
Pidana Anak	5	5	Nihil
Pra Peradilan	1	1	Nihil
Pidana Cepat	7	7	Nihil
Lalu Lintas	1733	1733	Nihil
Jumlah	1854	1854	Nihil

Tabel 33. Perkara Pidana yang Diputus Tepat Waktu

b. Perdata

Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu
Gugatan	34	34	Nihil
Permohonan	95	95	Nihil
Gugatan Sederhana	14	14	Nihil
Jumlah	143	143	Nihil

Tabel 33. Perkara Perdata yang Diputus Tepat Waktu

c. Rekapitulasi Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu
Pidana	1854	1854	Nihil
Perdata	143	143	Nihil

Tabel 33. Rekapitulasi Perkara yang Diputus Tepat Waktu

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

a. Pidana

UPAYA HUKUM BANDING		
Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Yang Tidak Mengajukan Banding
Pidana Biasa	108	106
Pidana Anak	5	5
Pra Peradilan	1	1
Pidana Cepat	7	7
Lalu Lintas	1733	1733
Jumlah		

Tabel 42. Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

UPAYA HUKUM KASASI		
Jenis Perkara	Putusan Banding Tahun 2023	Yang Tidak Mengajukan Kasasi
Pidana Biasa	3	0
Pidana Anak	0	0
Jumlah	3	0

Tabel 42. Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI		
Jenis perkara	Putusan Kasasi Tahun 2023	Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali
Pidana Biasa	2	0
Pidana Anak	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 42. Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

b. Perdata

UPAYA HUKUM BANDING		
Jenis perkara	Putus Tahun 2023	Yang Tidak Mengajukan Banding
Gugatan	34	7
Permohonan	95	0
Gugatan Sederhana	14	0
Jumlah		

Tabel 42. Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

UPAYA HUKUM KASASI		
Jenis Perkara	Putusan Banding Tahun 2023	Yang Tidak Mengajukan Kasasi
Gugatan	7	4
Gugatan Sederhana	0	0
Permohonan	0	0
Jumlah		

Tabel 42. Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI		
Jenis Perkara	Putusan Kasasi Tahun 2023	Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali
Gugatan	3	0
Gugatan Sederhana		
Permohonan		
Jumlah		

Tabel 42. Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Perkara yang dimediasi	Mediasi Berhasil
Gugatan	34+9	25	3
Permohonan	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	43	25	3

Tabel 48. Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Diversi	Diversi Berhasil
Pidana Anak	5	0	Nihil
Jumlah	5	0	Nihil

Tabel 49. Perkara Pidana Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. Pos Bantuan Hukum

Dalam Melaksanakan Implementasi Undang-undang kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 Jo Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.. dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Banyumas Teguh BAYu Aji, S.H. pada tanggal 9 Januari 2023 telah melakukan MOU (Memorandum Of Understanding) dengan tentang Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Banyumas.

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. Meringankan pembebasan biaya/beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan Negeri Banyumas;
- b. Meningkatkan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Banyumas.
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pengadilan Negeri Banyumas pada tahun 2023 dalam program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor SP DIPA-005.03.2.099125/2023 Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk Pos Bantuan Hukum dan target volume output sebesar 240 jam layanan. Dari Anggaran



tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp24.000.000,00 (100%) dengan capaian volume output sebesar 240 jam layanan.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Tidak terdapat Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banyumas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya *zitting plaats* atau tempat sidang.

3. Perkara Prodeo

Tidak terdapat perkara prodeo yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas dikarenakan tidak tersedianya anggaran pembebasan biaya perkara dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banyumas dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court Excellence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Banyumas mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Banyumas telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf .

Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Banyumas dengan Ketua, Wakil dan Hakim yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 27 orang dengan perincian:

Ketua	1	orang
Wakil Ketua	-	orang
Hakim	4	orang
Panitera	1	orang
Sekretaris	1	orang



Panitera Muda Hukum	1	orang
Panitera Muda Perdata	1	orang
Panitera Muda Pidana	1	orang
Ka.Sub.Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	orang
Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan	1	orang
Ka.Sub.Bag. Perencanaan, Informasi Teknologi Pelaporan	-	orang
Panitera Pengganti	6	orang
Juru sita	2	orang
Juru Sita Pengganti	2	orang
Staf Pelaksana	5	orang

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	TMT
1.	Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H. 198004102002122002	IV b Ketua Pengadilan	28-12-2023
2.	Rino Ardian Wigunadi, S.H. 198111122009121005	III d Hakim Pratama Utama	28-06-2021
3.	Suryo Negoro, SH., M.Hum. 198309162009121004	III d Hakim Pratama Utama	09-03-2020
4.	Firdaus Azizy, S.H., M.H. 198408232009121005	III d Hakim Pratama Utama	21-06-2021
5.	Dwi Putra Darmawan, S.H. 199312042017121005	III b Hakim Pratama Muda	01-12-2023
6.	Chairullah, S.H., M.H. 197509032000031003	IV a Panitera	15-12-2022
7.	Yuni Istiati, S.H. 196606111985032001	III d Sekretaris	26-08-2022
8.	Nova Soegiarto, S.H. 197011151999031001	III d Panitera Muda Pidana	18-11-2022
9.	Aswin Priyatno, S.H.	III d	29-11-2022

	197111061992031003	Panitera Muda Hukum	
10.	Damas Satriyo Wibowo, S.H. 198607162006041001	III c Panitera Muda Perdata	29-11-2022
11.	Salam, S.H. 196901081993031002	III d Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	29-12-2015
12.	Ariesti Sumartina, S.H. 198403232005022001	III c Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	25-05-2023
13.	Sudarsijah, S.H. 196704301988032002	III d Panitera Pengganti	01-10-2018
14.	Darminah, S.H. 196312251992032004	III d Panitera Pengganti	01-04-2015
15.	Mistam, S.H. 196810081989031003	III d Panitera Pengganti	25-05-2023
16.	Poernama Edy, S.H. 196512081991031007	III d Panitera Pengganti	01-04-2019
17.	Widodo Anggun Thaariq, S.H. 19871104 201403 1 003	III c Panitera Pengganti	15-12-2022
18.	Atrita Puitisia, S.H., M.H. 198604152015031003	III c Panitera Pengganti	01-04-2023
19.	Suripto 196707071993031005	III b Jurusita	01-12-2022
20.	Sularsih 196607071991032002	III b Jurusita Pengganti	01-04-2013
21.	Djoko Harjono 197003191993071001	III b Jurusita	01-12-2022
22.	Toni Daryono	III b	01-04-2017

	197305091993031001	Jurusita Pengganti	
23.	Mutiara Putri Nirwanawati, S.H. 199008232020122005	III a Analisis Perkara Peradilan	01-02-2021
24.	Giovani Bajeng Rahayu Ratri, S.H. 198809022022032005	III a Analisis Perkara Peradilan	01-03-2022
25.	Pramudhita Andarjati, S.H. 199807252022032012	III a Analisis Perkara Peradilan	01-03-2022
26.	Wahyudi, A.Md. 199205242020121003	II c Pengadministrasi Registrasi Perkara	01-02-2021
27.	Maria Margaretha Situmorang, A.Md. 199210162022032009	II c Pengelola Perkara	01-04-2022

Tabel 51. Daftar Pegawai Negeri

Pengadilan Negeri Banyumas juga memiliki tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sejumlah 10 orang dengan perincian:

- Satpam : 2 Orang
- Pengemudi : 2 Orang
- Pramubakti : 6 orang

NO	NAMA	JABATAN	TMT
1.	Agus Sularto	PPNPN	03-03-2008
2.	Arif Sudarsono	PPNPN	03-03-2008
3.	Sutrisno	PPNPN	05-01-2009
4.	Udianto	PPNPN	31-07-2007
5.	Fandi Wicaksono, S.E.	PPNPN	04-01-2012

6.	Yoki Prihananto, A.Md.	PPNPN	01-02-2016
7.	Suratno	PPNPN	02-01-2020
8.	Yogi Widy Astomo, S.Kom.	PPNPN	04-01-2021
9.	Adimas Fauzan, S.Kom.	PPNPN	04-01-2021
10.	Ajeng Mustika Ningrum, A.Md.	PPNPN	17-05-2022

Tabel 51. Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Komposisi Pegawai Negeri berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1.	II	2
2.	III	23
3.	IV	2

Komposisi Pegawai Negeri berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	5
2.	S-1	16
3.	Diploma 3	2
4.	SLTA	4

- Mutasi / Promosi masuk**

Berikut adalah daftar nama pegawai yang mutasi, baik itu mutasi masuk maupun mutasi keluar pada Pengadilan Negeri Banyumas sepanjang tahun 2023 :

NO	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1.	Mistam, S.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas	25-05-2023

2.	Ariesti Sumartina, S.H.	Analisis Perkara Peradilan pengadilan Negeri Purwokerto	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas	25-05-2003
3.	Dwi Putra Darmawan, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo	Hakim Pengadilan Negeri Banyumas	01-12-2023
4.	Asyrotun Mugiasuti, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang	Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	28-12-2023

Tabel 53 Tabel Mutasi Promosi Masuk

- Mutasi / Promosi Keluar**

NO	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1.	Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	Hakim Pengadilan Negeri Surakarta	28-12-2023
2.	Wasis Priyanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	Ketua Pengadilan Negeri Batang	28-12-2023
3.	Riana Kusumawati, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Banyumas	Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto	03-05-2023
4.	Suparti, S.H.	PAnitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Batang	06-06-2023

Tabel 53 Tabel Mutasi Promosi Keluar

- Pensiun**

Berikut adalah daftar nama pegawai yang pensiun di Pengadilan Negeri Banyumas sepanjang tahun 2023 :

NO	Nama	NIP	Jabatan	TMT
1.	Edy Sarwono	196501071993031001	Jurusita Pengadilan Negeri Banyumas	01-02-2023
2.	Juli Mantoro	196507151993031004	Jurusita Pengadilan Negeri Banyumas	01-08-2023

Tabel 56. Pegawai Pensiun

- Diklat**

Berikut adalah daftar nama pegawai yang mengikuti Diklat dari Pengadilan Negeri Banyumas sepanjang tahun 2023 :

NO	Nama	Jabatan	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan
1.	Maria Margaretha Situmorang, A.Md.	Pengatur (II/c) Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, PN Banyumas	Bimbingan Teknis Penyegaran Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran	9 Februari 2023
2.	Yogi Widy Astomo, S.Kom.	PPNPN	Bimbingan Teknis Penyegaran Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran	9 Februari 2023
3.	Firdaus Azizy, S.H., M.H.	Penata Tk.I (III/d) Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Banyumas	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang I	12 s.d 17 Maret 2023



4.	Yogi Widy Astomo, S.Kom.	PPNPN	Bimbingan Teknis Penyegaran Aplikasi SAKTI Modul Komitmen	20 Maret 2023
5.	Yuni Istiati, S.H.	Penata Tk.I (III/d) Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik negara Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI di Wilayah Yogyakarta Gelombang II Tahun 2023	29 s.d. 31 Mei 2023
6.	Wasis Priyanto, S.H., M.H.	Pembina (IV/d) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	Pelatihan Sertifikasi Mediator	5 s.d. 19 Mei 2023 Tahap I 21 s.d. 31 Mei 2023 Tahap II
7.	Giovani Bajeng Rahayu Ratri, S.H.	Penata Muda (III/a) Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Banyumas	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara	30 Mei s.d 16 Juni 2023
8.	Pramudhita Andarjati, S.H.	Penata Muda (III/a) Klerek - Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Banyumas	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara	28 Juni s.d 14 Juli 2023
9.	Ariesti Sumartina, S.H.	Penata (III/c) Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas	Bimbingan Teknis Penyegaran Aplikasi SAKTI Modul Bendahara	22 Juni 2023
10.	Ariesti Sumartina, S.H.	Penata (III/c)	Bimbingan Teknis Refreshment	24 Agustus 2023

		Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banyumas	SAKTI Modul Pembayaran dan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan bagi NPWP Instansi Pemerintah	
11.	Mutiara Putri Nirwanawati, S.H.	Penata Muda (III/a) Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Banyumas	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Angkatan III dan IV Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	9 s.d. 26 Oktober 2023
12.	Maria Margaretha Situmorang, A.Md.	Pengatur (II/c) Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, PN Banyumas	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Angkatan III dan IV Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	9 s.d. 26 Oktober 2023
13.	Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b) Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	Pelatihan Sertifikat Hakim Lingkungan Hidup	12 Oktober s.d. 8

			Angkatan XIX bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	November 2023
14.	Chairullah, S.H, M.H.	Pembina (IV/a) Panitera Pengadilan Negeri Banyumas	Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Perkara Peradilan bagi Panitera Pengadilan Tahun Anggaran 2023	13 s.d 27 November 2023
15.	Yuni Istiati, S.H.	Penata Tk.I (III/d) Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2023	20 s.d 23 November 2023
16.	Yoki Prihananto, A.Md.	PPNPN	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2023	20 s.d 23 November 2023

Tabel 57. Tabel Diklat



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Banyumas memiliki 2 (dua) DIPA yaitu:

- a. DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.098022/2023 Tanggal 30 November 2022
- b. DIPA Nomor: SP DIPA-005.03.2.099125/2023 Tanggal 30 November 2022

Hingga dengan bulan Desember Tahun 2023 ini, untuk DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.098022/2023 Tanggal 30 November 2022 telah dilakukan Revisi sebanyak 6 (enam) kali Revisi yang terdiri dari :

1. Revisi ke 01 Tanggal 16 Februari 2023
2. Revisi ke 02 Tanggal 18 April 2023
3. Revisi ke 03 Tanggal 17 Juli 2023
4. Revisi ke 04 Tanggal 23 Oktober 2023
5. Revisi ke 05 Tanggal 8 Desember 2023
6. Revisi ke 06 Tanggal 2 Desember 2023

Sedangkan DIPA Nomor: SP DIPA-005.03.2.099125/2023 Tanggal 30 November 2022 telah dilakukan Revisi sebanyak 4 (empat) kali Revisi yang terdiri dari :

1. Revisi ke 01 Tanggal 17 April 2023
2. Revisi ke 02 Tanggal 17 Juli 2023
3. Revisi ke 03 Tanggal 14 Oktober 2023
4. Revisi ke 04 Tanggal 7 Desember 2023

Pelaksanaan anggaran DIPA 005.01.2.098022/2023 (Badan Urusan Administrasi) yaitu sebesar Rp4.460.835.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan sebagai berikut:

URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	(%)
Belanja Barang (52) Non Operasional	7,008,000	7,004,000	4,000	99.94 %
Belanja Pegawai (51) Gaji dan Tunjangan	3,196,576,000	3,059,687,105	136,888,895	95.72 %
Belanja Barang (52) Operasional dan Pemerlihaan Kantor	1,257,251,000	1,255,193,338	2,057,662	99,84 %
Belanja Modal (53)	0	0	0	0
Jumlah	4,460,835,000	4,321,884,443	138,950,557	96.89 %

Tabel 62. Tabel Realisasi dipa 01

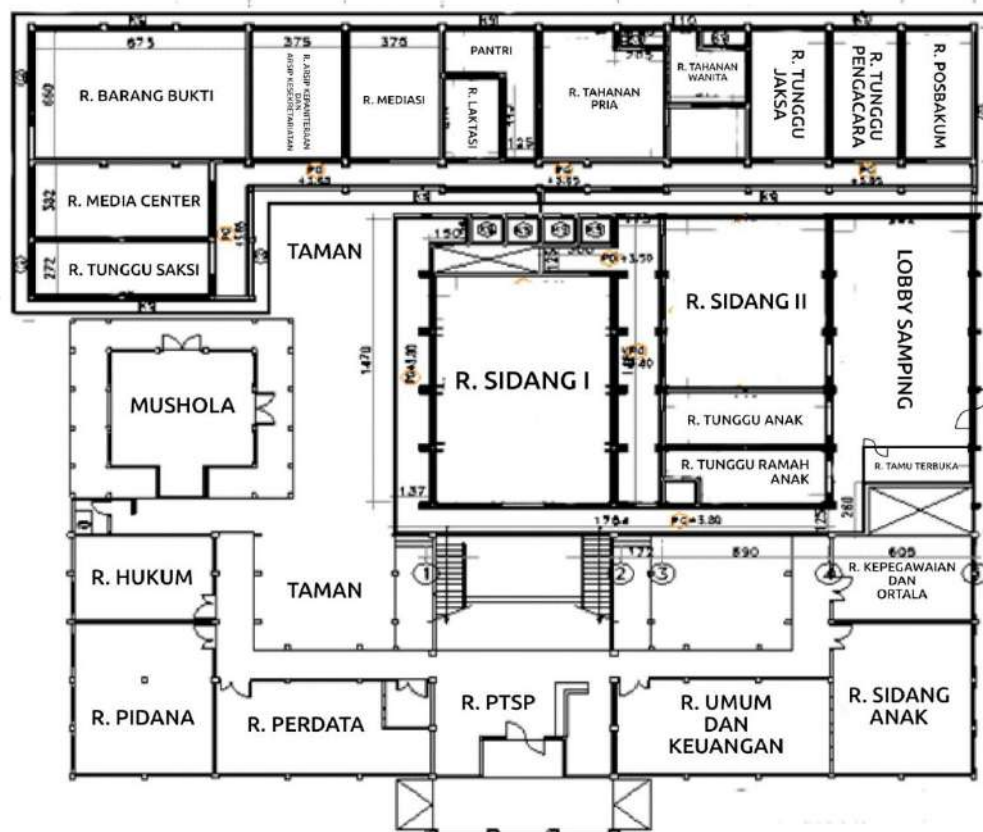
Pelaksanaan anggaran DIPA 005.03.2.0991252/2023 (Badan Urusan Administrasi) yaitu sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan sebagai berikut:

URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	(%)
Belanja Barang (52)	68,500,000	68,441,400	58,600	99,91 %

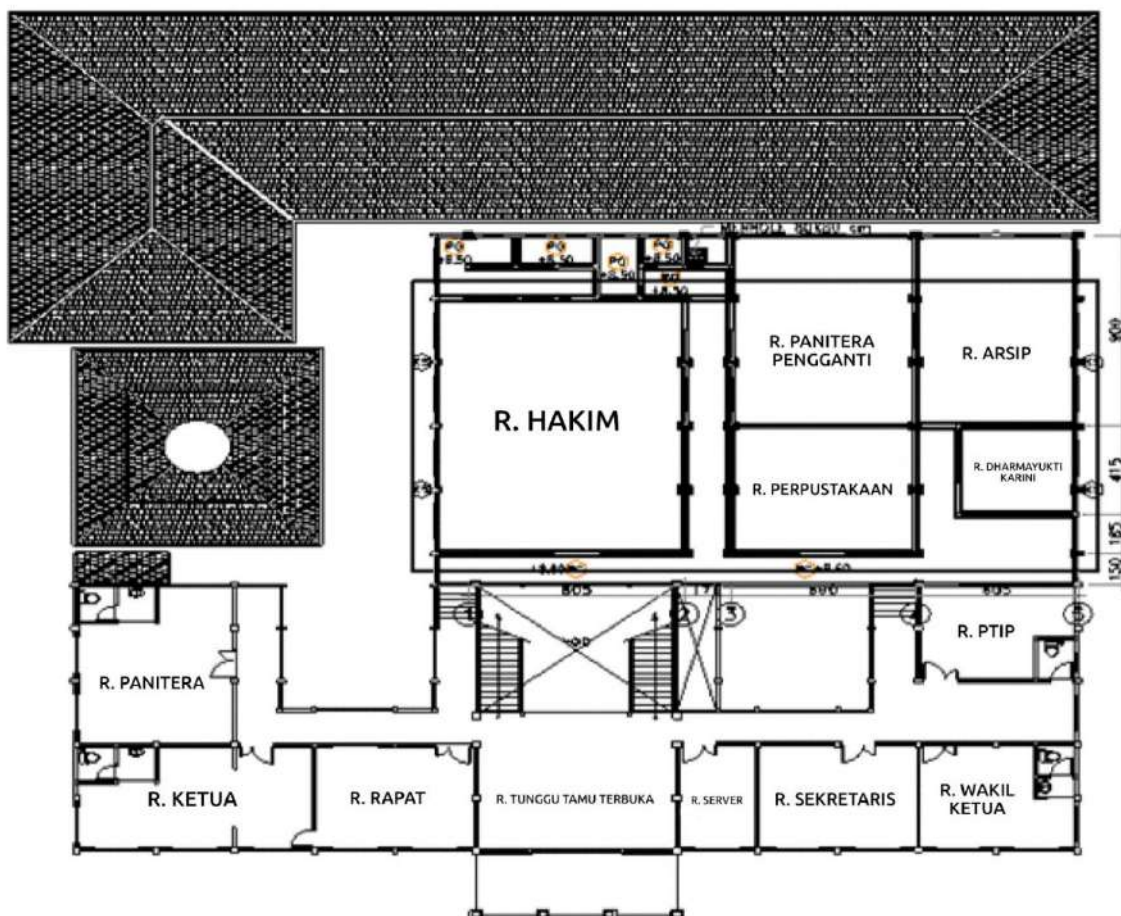
Tabel 63. Tabel Realisasi dipa 03

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II yang terletak di Jalan Pramuka No. 9 Banyumas menempati area tanah seluas $\pm 5.250 \text{ m}^2$ dengan fasilitas gedung yang terdiri dari 2 (dua) lantai seluas 1.961 m^2 dan sudah menjadi satu bangunan induk (KIB no. 3). Lantai satu meliputi : Ruang Sub Bagian Umum & Keuangan, Ruang Kepegawaian dan Ortala, Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan Perdata, Ruang Kepaniteraan Hukum, Ruang Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Pengacara, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Sidang I (utama), Ruang Sidang II, Ruang Sidang Anak, Ruang PTSP, Ruang Tahanan Pria, Ruang Tahanan Wanita, Ruang Tunggu Anak, Ruang Diversi, Ruang Laktasi, Ruang Pantri, Ruang Tunggu Saksi, Ruang Dharmayukti, Ruang Gudang, 5 (lima) toilet luar, 1 (satu) toilet dalam dan Mushola. Pada lantai dua meliputi antara lain : Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Panitera, Ruang Sekretaris, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Subbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Ruang Server, Ruang Galeri, Ruang Arsip, Ruang Perpustakaan, Ruang Rapat, 3 (tiga) Toilet luar, dan 4 (empat) Toilet dalam ruangan.



Denah Lantai 1 Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II.



Denah Lantai 2 Kantor Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II.

Keterangan Gedung :

Letak gedung : Jl. Pramuka no.9 Banyumas

Status tanah : Hak Milik

Sertifikat tanah : No.9 Sertifikat Hak Pakai

Luas Tanah : 5.250 m²

Luas Bangunan : 1.971 m² (2 lantai)

Diperoleh : 12-03-1981 (Bangunan) dan 28-02-1979 (Tanah)

Keterangan Bangunan / Ruangan

(Lantai 1)

R. Sidang I	:	12 m x 7,5 m
R. Lobby Samping	:	12 m x 5,9 m
R. Sidang II	:	9 m x 7,5 m
R. Sidang Anak	:	7,5 m x 3 m
R. Tunggu Anak	:	7,5 m x 3 m
R. Lobby Depan	:	7,5 m x 5 m
R. Perdata	:	9 m x 5 m
R. Pidana	:	8 m x 5,9 m
R. Hukum	:	5,9 m x 4,5 m
R. Umum & Keuangan	:	9 m x 5 m
R. Kepegawaian & Ortala	:	8 m x 5,9 m
R. Arsip Umum & Keuangan	:	5,9 m x 4,5 m
Musholla	:	9 m x 8,9 m
Toilet Umum x 5	:	2 m x 2 m
R. Dharmayukti	:	9 m x 3 m
Gudang	:	9 m x 4 m
R. Barang Bukti	:	9 m x 7 m
R. Diversi	:	7 m x 4 m
R. Mediasi	:	7 m x 4 m
Pantri & R. Menyusui	:	7 m x 4 m
R. Tahanan Pria	:	7 m x 5,3 m
R. Tahanan Wanita	:	3,5 m x 3,3 m
R. Jaksa	:	7 m x 3,3 m
R. Pengacara	:	7 m x 3 m
R. Posbakum	:	7 m x 3 m

(Lantai 2)

R. Ketua	:	8,9 m x 5 m
R. Panitera	:	7,5 m x 5,9 m
R. Rapat	:	6 m x 5 m
R. Loby Atas	:	7,5 m x 5 m
R. Server	:	5 m x 3 m
R. Sekretaris	:	6 m x 5 m
R. Wakil	:	5,9 m x 5 m
R. Perencanaan, TI &	:	5,9 m x 5 m

Pelaporan

R. Dharmayukti	:	5 m x 4 m
R. Arsip	:	9 m x 5,9 m
R. Panitera Pengganti	:	9 m x 6 m
R. Perpustakaan	:	6 m x 6 m
R. Hakim	:	12 m x 7,5 m

Untuk mendukung jalannya proses peradilan, Pengadilan Negeri Banyumas memiliki 2 (dua) ruang sidang reguler, dan 1 (satu) ruang sidang anak. Disamping itu, untuk mendukung para pengunjung sidang terdapat ruang tunggu sidang, ruang tunggu saksi, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang pengacara *smoking area* dan mushola untuk keperluan ibadah. Kemudian untuk pelayanan pencari keadilan, Pengadilan Negeri Banyumas menyediakan ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ruang tamu terbuka bagi tamu pimpinan pengadilan serta fasilitas difabel untuk kenyamanan pengunjung difabel, dan *E-Court Corner* sebagai pendukung peradilan elektronik yang terletak pada ruang PTSP. Bagi pihak Kejaksaan, terdapat ruang jaksa yang terletak bersebelahan dengan ruang tahanan. Dan juga tersedia halaman parker yang luas bagi para pengunjung sidang atau para tamu pelayanan.

Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai Rumah dinas sejumlah 7 (tujuh) unit yang diperuntukan bagi Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, dan Sekretaris. Di samping itu untuk memperlancar aktivitas kantor maupun

operasional maka diperlukan sarana dan prasarana yang berupa Kendaraan Roda Empat sejumlah 2 (dua) unit, Kendaraan Roda Dua sejumlah 4 (empat) unit, dan alat-alat kantor lainnya.

Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pengelolaan sarana dan prasarana gedung maka dikelola dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Sarana pendukung keamanan dengan memisahkan antara pengunjung layanan PTSP dan pengunjung sidang yang dipisah menjadi dua pintu, kemudian peralatan untuk menunjang pemantauan lingkungan kantor berupa peralatan CCTV sudah tersedia dengan 14 (empat belas) kamera.

1. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tercatat dalam lembar pemeliharaan. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor di lakukan secara rutin dengan melakukan perawatan Peralatan dan Mesin dengan bekerja sama dengan rekanan pihak ketiga. Pemeliharaan Gedung Kantor di lakukan secara rutin dengan melakukan perawatan dan pengecatan gedung dengan biaya yang sudah di anggarkan dalam DIPA Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2023, sedangkan untuk pemeliharaan Rumah Dinas hanya 7 (tujuh) rumah dinas yang pemeliharaannya menggunakan anggaran Negara.

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Kondisi			Alamat
				B	RR	RB	
1.	Rumah Negara Gol.I Type C Pemanen	1979	70	V			Jalan Ksatria No.11 RT 001/RW 002 Desa Kedunguter, Banyumas.

2.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1982	70		V	Jalan Pemotongan No.7 RT 001/RW 001 Desa Kedunguter, Banyumas.
3.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1982	70		V	Jalan Pemotongan No.7A RT 001/RW 001 Desa Kedunguter, Banyumas.
4.	Rumah Negara Gol.I Type C Pemanen	1978	70		V	Jalan Pengadilan No.14 RT 001/RW 002 Desa Kedunguter, Banyumas.
5.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1981	70		V	Jalan Karangsawah No.39 RT 006/RW 006 Desa Kedunguter, Banyumas.
6.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1981	70		V	Jalan Karangsawah No.41 RT 006/RW 006 Desa

							Kedunguter, Banyumas.
7.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1981	70		V		Jalan Pramuka No.5 RT 001/RW 001 Desa Sudagaran, Banyumas.

Tabel 64. Data rumah dinas PN Banyumas

a. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Negeri Banyumas baik berupa peralatan kantor dan meubelair maupun kendaraan.

2.1. Kendaraan Dinas

No.	Nama Barang	Merk/ Type	Bukti Kepemilikan (BPKB)		
			NOMOR POLISI	NOMOR	ATAS NAMA
1	Station Wagon	Toyota Innova	R-1146-XA	F No. 2227582 G	Pengadilan Negeri Banyumas
2	Sedan	Toyota Vios	R-1187-XA	D No. 0447089 I	Pengadilan Negeri Banyumas
3	STATION WAGON	Toyota Avanza	R-9503-FG		Pemda Kabupaten Banyumas (pinjam pakai)
4	Station Wagon	Toyota Innova	R-1108-XA		Pemda Kabupaten Banyumas (Pinjam Pakai)
5	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	R-6501-XA	D No. 7764398 I	Pengadilan Negeri Banyumas
6	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	R-6500-XA	D No. 7764400 I	Pengadilan Negeri Banyumas
7	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	R-6195-XH	E No. 5613507 I	Pengadilan Negeri Banyumas
8	Sepeda Motor	Honda Revo	R-9963-EH	F No. 4693339 I	Pengadilan Negeri Banyumas

Tabel 65. Data kendaraan dinas

2.2. Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Bangunan (M ²)	Kondisi			Alamat
				B	RR	RB	
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1981		V			Jalan Pramuka No.9 Desa Sudagaran, Banyumas
2.	Rumah Negara Gol.I Type C Pemanen	1979	70	V			Jalan Ksatria No.11 RT 001/RW 002 Desa Kedunguter, Banyumas.
3.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1982	70		V		Jalan Pemotongan No.7 RT 001/RW 001 Desa Kedunguter, Banyumas.
4.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1982	70		V		Jalan Pemotongan No.7A RT 001/RW 001 Desa Kedunguter, Banyumas.
5.	Rumah Negara Gol.I Type C Pemanen	1978	70		V		Jalan Pengadilan No.14 RT 001/RW 002 Desa

						Kedunguter, Banyumas.
6.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1981	70		V	Jalan Karangsawah No.39 RT 006/RW 006 Desa Kedunguter, Banyumas.
7.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1981	70		V	Jalan Karangsawah No.41 RT 006/RW 006 Desa Kedunguter, Banyumas.
8.	Rumah Negara Gol.II Type C Pemanen	1981	70		V	Jalan Pramuka No.5 RT 001/RW 001 Desa Sudagaran, Banyumas.
9.	Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	1956	441		V	Jalan Pengadilan No.28 RT 001/RW 002 Desa Kedunguter, Banyumas.
10.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2016	57	V		Jalan Pramuka No.9 Desa Sudagaran, Banyumas

Tabel 66. Data Gedung Kantor dan Rumah Dinas

2.3. Tanah

Nama Barang	NUP	Luas (m ²)	Lokasi	Tahun Perolehan
Tanah Bangunan Rumah Negera Golongan I	1	278	Jl. Ksatria No.11 Desa Kedunguter, Banyumas	1979
Tanah Bangunan Rumah Negera Golongan I	2	200	Jl. Pengadilan No.14 Desa Kedunguter, Banyumas	1978
Tanah Bangunan Rumah Negera Golongan II	1	700	Jl. Pemotongan No. 7/7A Desa Kedunguter, Banyumas	1983
Tanah Bangunan Rumah Negera Golongan II	2	1.600	Jl. Karangsawah No.39/41 Desa Kedunguter, Banyumas	1982
Tanah Bangunan Rumah Negera Golongan II	3	450	Jl. Pramuka No.5 Desa Sudagaran, Banyumas	1980
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	2.150	Jl. Pengadilan No.28 Desa Kedunguter, Banyumas	1938
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	5.250	Jl. Pramuka No.9 Desa Sudagaran, Banyumas	1980

Tabel 67. Data Tanah

2.4. Matriks Sarana dan Prasarana

No.	Sarana/ Prasarana Gedung	Jml Ruang	Keadaan			Prasarana Lengkap /Tdk Lengkap
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	RUANGAN				I	RUANGAN
1	Ruang Ketua	1	V			TL
2	Ruang Wakil Ketua	1	V			TL
3	Ruang Panitera	1	V			TL
4	Ruang Sekretaris	1	V			TL
5	Ruang Hakim	1	V			L
6	Ruang Panitera Pengganti	1	V			TL
7	Ruang PTIP	1	V			L
8	Ruang Perpustakaan	1	V			L
9	Ruang Rapat	1	V			L
10	Ruang Arsip	1	V			L
11	Ruang Server	1	V			L
12	Ruang Galeri	1	V			L
13	Ruang Bendahara	1	V			L
14	Ruang PTIP	1	V			L
15	Ruang Umum Keuangan	1	V			L
16	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	V			L
17	Ruang Perdata	1	V			L
18	Ruang Pidana	1	V			L
19	Ruang Hukum	1	V			L
20	Ruang Sidang Umum	2	V			L
21	Ruang Sidang Anak	1	V			L
22	Ruang PTSP	1	V			L
23	Ruang Tunggu Sidang	1	V			L
24	Ruang Posbakum	1	V			L

25	Ruang Tunggu Jaksa	1	V			TL
26	Ruang Tunggu Advokat	1	V			TL
27	Ruang Tahanan (Pria/Wanita)	1	V			TL
28	Ruang Tunggu Anak	1	V			TL
29	Ruang Tunggu Saksi	1	V			L
30	Ruang Laktasi/Menyusui	1	V			L
31	Ruang Dharmayukti	1	V			L
32	Ruang Arsip Kesekretariatan/Kepaniteraan	1	V			L
33	Ruang Gudang	1	V			L
34	Ruang Mediasi	1	V			L
35	Ruang Diversi	1	V			L
36	Mushola	1	V			L
37	Toilet Luar	8	V			L
38	Toilet Dalam	7	V			L
II	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Stationary Generating Set	1	1	0	0	
2	Portable Water Pump	1	1	0	0	
3	Sedan	1	1	0	0	
4	Station Wagon	1	1	0	0	
5	Sepeda Motor	4	2	2	0	
6	Scanner (Universal Tester)	1	1	0	0	
7	Lemari Besi/Metal	13	10	3	0	
8	Lemari Kayu	29	11	14	4	
9	Rak Besi	14	14	0	0	
10	Filing Cabinet Besi	15	10	2	3	

11	Brandkas	1	1	0	0	
12	Buffet	5	3	2		
13	Tempat Menyimpan Gambar	5	5	0	0	
14	Tabung Pemadam Api	7	6	1	0	
15	CCTV - Camera Control Television System	2	2	0	0	
16	Papan Visual/Papan Nama	3	1	0	2	
17	White Board	14	14	0	0	
18	Peta	1	1	0	0	
19	Mesin Absensi	1	1	0	0	
20	Hand Metal Detector	2	1	1	0	
21	LCD Projector/Infocus	1	1	0	0	
22	Meja Kerja Besi/Metal	2	2	0	0	
23	Meja Kerja Kayu	96	70	21	5	
24	Kursi Besi/Metal	170	163	0	7	
25	Kursi Kayu	56	28	17	11	
26	Sice	17	16	1	0	
27	Bangku Panjang Besi/Metal	19	19	0	0	
28	Bangku Panjang Kayu	19	7	6	6	
29	Meja Rapat	25	15	8	2	
30	Meja Komputer	5	2	0	3	
31	Meja Resepsionis	6	6	0	0	
32	Sketsel	6	6	0	0	
33	Gantungan Jas	4	4	0	0	
34	Backdrop TV/Wardrobe	1	1	0	0	
35	Meubelair Lainnya	2	2	0	0	
36	Jam Elektronik	11	10	1	0	
37	Mesin Pemotong Rumput	1	0	0	1	

38	A.C. Window	15	13	0	2	
39	A.C. Split	20	20	0	0	
40	Kipas Angin	2	1	0	1	
41	Treng Air/Tandon Air	1	1	0	0	
42	Televisi	4	4	0	0	
43	Sound System	3	2	0	1	
44	Lambang Garuda Pancasila	1	1	0	0	
45	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1	0	0	
46	Tiang Bendera	3	3	0	0	
47	Tangga Aluminium	1	1	0	0	
48	Kaca Hias	7	6	1	0	
49	Mimbar/Podium	1	1	0	0	
50	Palu Sidang	8	8	0	0	
51	Lambang Instansi	1	1	0	0	
52	Handy Cam	1	0	0	1	
53	Microphone/Wireless MIC	1	1	0	0	
54	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	6	0	0	
55	LCD Monitor	3	3	0	0	
56	Telephone (PABX)	1	1	0	0	
57	Pesawat Telephone	3	2	1	0	
58	Internet	1	1	0	0	
59	Komputer Jaringan Lainnya	2	2	0	0	
60	P.C Unit	51	43	0	8	
61	Lap Top	10	8	0	2	
62	Note Book	8	8	0	0	
63	Tablet PC	1	1	0	0	
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	10	0	4	

65	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3	0	0	
66	Server	3	3	0	0	
67	Router	1	1	0	0	
68	Rak Server	1	1	0	0	
69	Peralatan Jaringan Lainnya	1	1	0	0	
70	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	0	0	
72	Monografi	7	7	0	0	
73	Buku Lainnya	18	18	0	0	
74	Bahan Kartografi Lainnya	1	1	0	0	
75	Software Komputer	1	0	0	1	
76	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	0	0	1	
77	Rak Kayu	10	0	10	0	
78	Meja Ketik	1	0	1	0	
79	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya)	1	0	0	1	
80	Megaphone	1	0	1	0	
81	Loudspeaker	4	4	0	0	
82	Microphone	7	7	0	0	
83	Bracket Standing Peralatan	1	1	0	0	
84	Audio Mixing Console	1	1	0	0	
85	Tripod Kamera	3	3	0	0	
86	Facsimile	1	0	1	0	
87	External CD/DVD Drive (ROM)	2	2	0	0	
88	External/Portable Hardisk	2	2	0	0	

Tabel 68. Matriks Sarana dan Prasarana

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Hardware (Perangkat Keras)

a) Perangkat Server

No	Nama Server dan Spesifikasi	Fungsi Server	Tahun Perolehan	Kondisi
1	FUJITSU (RX1330M1) Type: Tower Processor : Intel Xeon E3-1231v3, Cache 8 mb, Quad Core, Speed 3.4 GHz Memory : 8 GB, DDR3 Hardisk : 1 TB	Server Aplikasi	2015	Baik
2	IBM Processor: Intel Xeon CPUE5504 @2,00GHz, 2,00 GHz RAM : 2GB HDD : 2 TB	Server Sharing Data	2011	Baik

Tabel 69. Perangkat Server

b) Router: Mikrotik RB1100AHX2 (13x Gigabit Ethernet, 1066MHz Dual Core CPU, 2GB RAM, Router OS L6).

c) Wireless Acces Point = 12 unit

d) CPU Kios K Touch Screen Core Solo/DDRAM 2Gb untuk aplikasi e-Court

2. Jaringan

a) Jumlah server yang terhubung dengan LAN : 2 unit

b) Nama provider internet (ISP): PT. PT Selaras Citra Terabit

c) Biaya sambungan internet dalam 1 bulan : Rp14.000.000,00



d) Besar Bandwidth yang diperoleh : 100 Mbps Dedicated

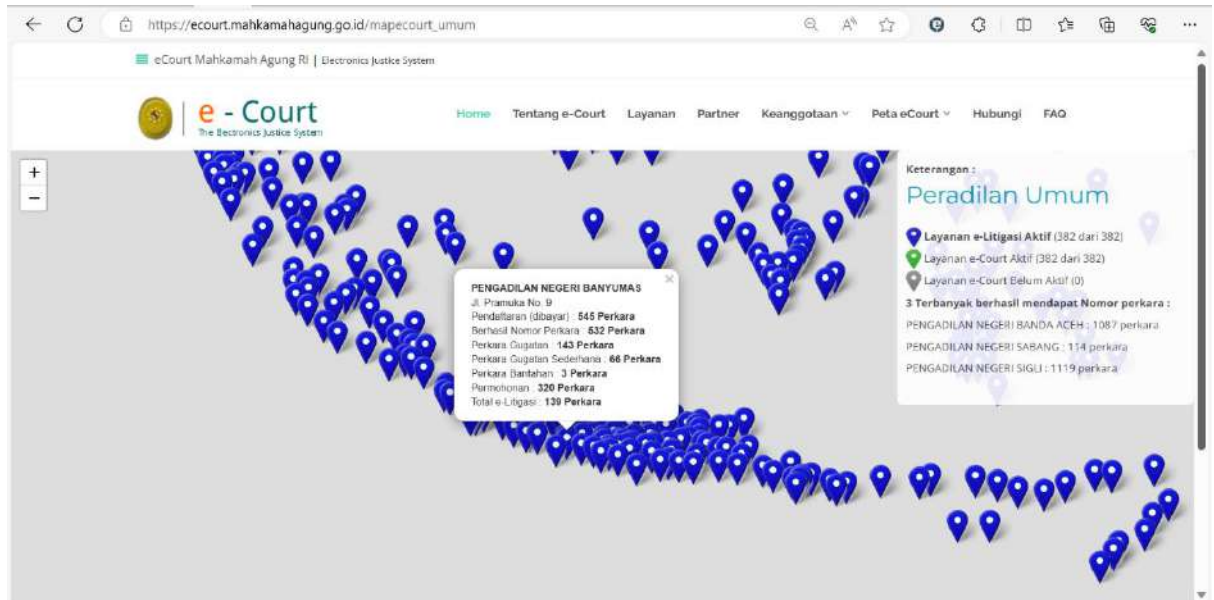
3. Publikasi Perkara (One day Publish)

“One Day Publish” merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa informasi perkara akan di publikasikan pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus.

Di Pengadilan Negeri Banyumas pada tahun 2018 dengan adanya Aplikasi SIPP yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara *online* oleh publik setiap saat melalui situs resmi Pengadilan Negeri Banyumas (<http://sipp.pn-banyumas.go.id/>).

Setiap perkara yang telah diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga amar putusan perkara semua dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus.

- Implementasi e-Court update ecourt



Berdasarkan data pada peta e-Court Mahkamah Agung, di Pengadilan Negeri Banyumas terdapat 545 pendaftaran perkara melalui e-Court. Dari 545 perkara yang masuk pendaftaran tersebut terdapat 532 perkara yang berhasil nomor perkara. 532 perkara tersebut terdiri dari 143 perkara gugatan, 66 perkara gugatan sederhana, 3 perkara bantahan, dan 320 perkara permohonan.

- Implementasi SIPP

SIPP Pengadilan Negeri Banyumas yang terpasang saat ini adalah versi 5.3.1. Pengadilan Negeri Banyumas telah dengan rutin dan tertib menginput data perkara ke SIPP dan mensinkronisasi ke server Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan website Pengadilan Negeri Banyumas.

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II pada tahun 2023 telah dilakukan Pengawasan dan Audit Surveillance Akreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Semarang. Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dari akreditasi A Excellent milik Pengadilan Negeri Banyumas. Adapun Tim Akreditasi Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :

- Ketua Tim : Agus Hariyadi S.H., M.H.
- Anggota Tim : 1. Santun Simamora, S.H., M.H.
2. Marchellus Muhartono, S.H.
3. Amin Surono, S.H.
4. Yudha Pradana Putra, A.Md.

Pengawasan dan Audit Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadministrasian maupun pelayanan publik di Pengadilan Negeri Banyumas telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadilan Negeri Banyumas telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP di Pengadilan Negeri Banyumas terdiri dari meja pelayanan Umum dan Keuangan, meja pelayanan Hukum, meja pelayanan Pidana, dan meja pelayanan Perdata. Selain itu terdapat pula meja inzage dan meja pelayanan e-Court (e-Court Corner). PTSP Pengadilan Negeri Banyumas bertugas sebagai pusat pelayanan terdepan dari Pengadilan Negeri Banyumas. Setiap pencari keadilan yang datang di Pengadilan Negeri Banyumas diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya hanya dengan mendatangi PTSP Pengadilan Negeri Banyumas.

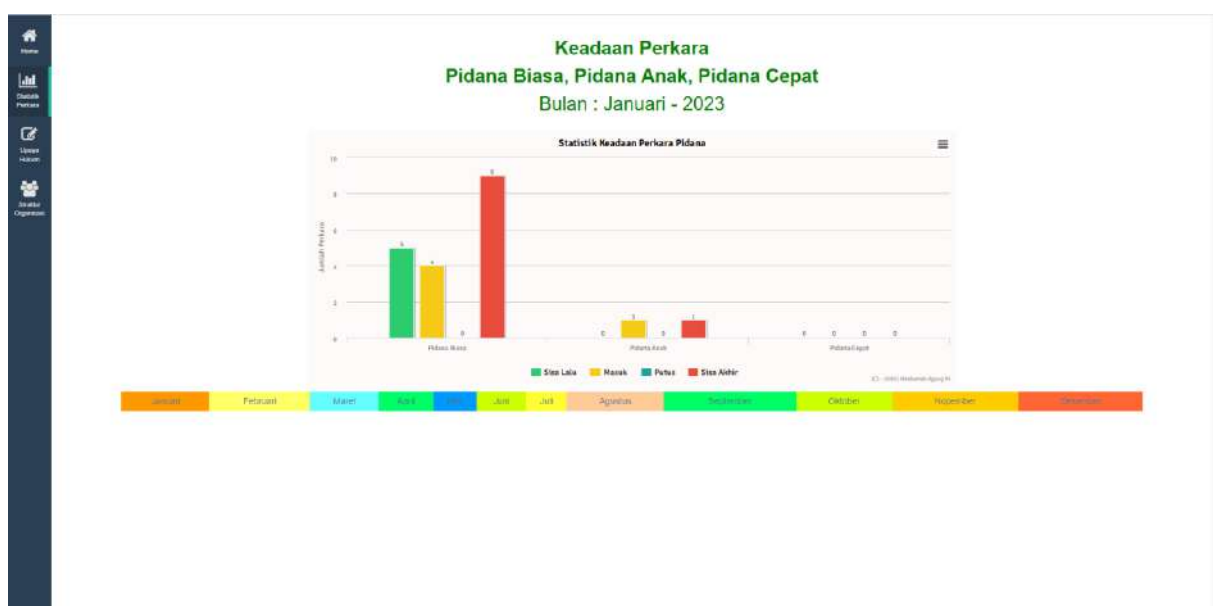
C. Inovasi Pelayanan Publik

1. Aplikasi Audio Anti Gratifikasi



Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan di dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam dan sebelum Persidangan dimulai melalui mikrofon.

2. Aplikasi Monitoring Perkara Kepaniteraan





PERKARA KASASI YANG BELUM PUTUS						
Sampai dengan : Januari - 2023						
No.	Nama Perkara	Tanggal Putusan PH	Tanggal Permohonan	Status Terakhir	Lama Proses	
2/PH Bns	2/PH Bns	29-05-2022	20-11-2022	Pengiriman Berkas Kasasi	30	
1/PH Bns	1/PH Bns	01-07-2021	15-08-2021	Pengiriman Berkas Kasasi	475	
19/PH Bns	19/PH Bns	19-04-2016	01-08-2016	Perkara Tidak Memenuhi Syarat Formil	2344	

Aplikasi Monitoring Perkara adalah aplikasi yang difungsikan sebagai display / tampilan di tiap ruangan Kepaniteraan yang secara Realtime terhubung dengan database SIPP Pengadilan Negeri Banyumas. Sehingga data dapat dilihat secara cepat dan akurat mulai dari grafik perkara, pengingat perkara berupa hukum serta tampilan Struktur Pembagian Tugas di Ruangan tersebut.

3. Aplikasi Antrian PTSP





Antrian digital PTSP Pengadilan Negeri Banyumas adalah inovasi mandiri untuk manajemen pengunjung di Pengadilan Negeri Banyumas dalam pelayanan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dengan antrian PTSP ini pengunjung memilih di layar touchscreen pada meja pelayanan apa yang akan dipilih, dan mendapatkan kertas antrian yang disertai QR code. Nomor antrian ini akan menjadi dasar dalam sistem pelayanan di pengadilan negeri Banyumas, siapa yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Dengan layanan antrian PTSP digital lebih terorganisir karena petugas PTSP dapat mengetahui secara mudah pada layar monitor PTSP berapa yang datang untuk antri dalam pelayanan pada tiap-tiap masing meja layanan, berapa yang sudah dipanggil dan terlayani atau dilewati, sehingga dapat dipanggil ulang untuk dilayani.

Inovasi ini adalah bentuk pemecahan masalah, yang sebelumnya antrian dengan menggunakan kertas antrian manual yang diberi nomor kemudian diberikan oleh petugas, akan tetapi kendalanya adalah pelayanan terkadang dapat dilayani secara acak karena tidak tercatat secara baik dalam buku maupun tidak terlihat langsung di layar monitor. Dengan permasalahan ini dirasa perlu untuk membuat sebuah solusi dengan membuat antrian pelayanan PTSP secara digital. Dan berikut adalah ilustrasi dari pelayanan digital PTSP di Pengadilan Negeri Banyumas.

HALAMAN PANGGILAN ANTRIAN PTSP PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 10-Jan-2020			
1	2	3	4
Meja Hukum	Meja Umum dan Informasi	Meja Perdata	Pidana
DAFTAR ANTRIAN PADA : Meja Hukum			
No.	Nomor Antrian	Status	Aksi
1	A-003	Belum Di Panggil	Panggil
2	A-004	Belum Di Panggil	Panggil
No.	Nomor Antrian	Status	Lama Penanganan
1	A-001	Selamat	

Gambar Tampilan Monitor Petugas PTSP



Gambar Tampilan Monitor Ambil Antrian



Gambar Cetak Kertas Antrian

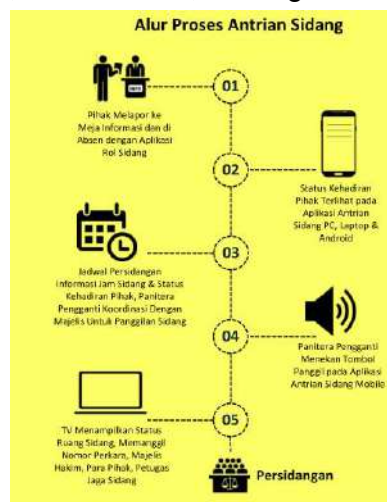
4. Aplikasi Antrian Sidang



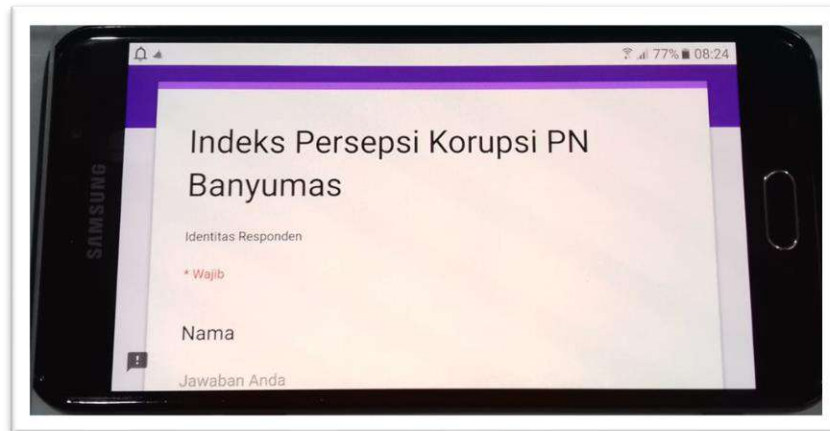
Antrian Sidang Pengadilan Negeri Banyumas adalah hasil Inovasi Mandiri. Aplikasi Antrian Sidang ini dapat dipanggil dari PC, Laptop atau Smartphone Android.

Antrian Sidang terintegrasi dengan Data Persidangan Harian dari SIPP dan mampu menampilkan Status Kehadiran Pihak secara *realtime* karena aplikasi antrian sidang terhubung dengan Aplikasi Rol Sidang di Meja Informasi.

Antrian Sidang Otomatis Menampilkan Data Persidangan, Status Kehadiran Pihak, Status Ruang Sidang, Memanggil Otomatis Menyebutkan Nomor Perkara, Majelis Hakim, Para Pihak, Ruang Sidang dan Petugas Penjaga Sidang.



5. Aplikasi Survei Indeks Persepsi Korupsi



Aplikasi Survei Indeks Persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani dibuat menggunakan format elektronik sehingga dapat mempercepat rekap data dan mengurangi penggunaan kertas berlebih.

6. Sarana Komunikasi Internal



Sarana Komunikasi Internal berupa Wireless Handy Talkie yang digunakan untuk berkoordinasi antara Majelis Hakim dengan Penjaga Tahanan maupun Penjaga Sidang pada saat persidangan.

7. Si-Ebes



Si-eBes merupakan aplikasi Inovasi Mandiri dari Pengadilan Negeri Banyumas yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam meminta surat izin besuk tahanan dengan sistem online sehingga pada saat hari besuk, masyarakat hanya menunjukkan dokumen data diri (KTP/SIM/Paspor) yang telah dikirim ke Si-eBes untuk diverifikasi oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Banyumas.





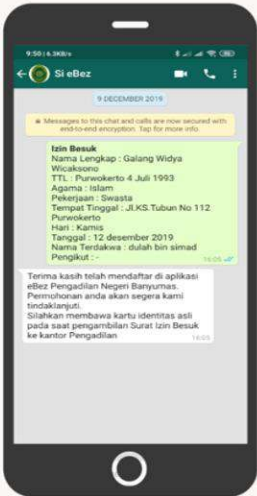
Si e-Bes

Sistem Izin Besuk Secara Elektronik Pengadilan Negeri Banyumas

 **Scan QR Code di bawah :**



➔



➡

PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
SURAT IZIN BESUK

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

➡



Setelah Pemohon melengkapi data diri dan Bukti Identitas, Petugas PN Banyumas akan membuat Surat Izin besuk sesuai permohonan.

**Call Center**
(0281) 796016

**PROSES CEPAT**

**TANPA BIAYA**

**BISA KAPANPUN**

8. Aplikasi SILAPER



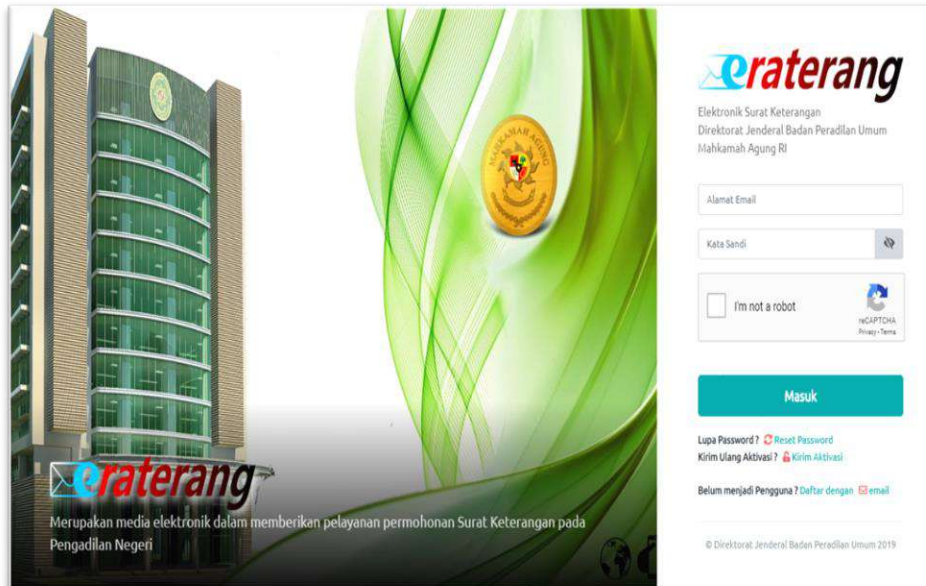
SILAPER atau Sistem Informasi Layanan Perkara dan Asisten Virtual adalah aplikasi hasil inovasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang digunakan untuk mengetahui info perkara di seluruh Pengadilan Negeri di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

9. e-Court



Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

12. Aplikasi Eraterang



Eraterang / Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada.

13. Re-Pel

Re-Pelerupakan aplikasi inovasi PN Banyumas yang bertujuan untuk mempermudah registrasi pengguna khusus ecourt



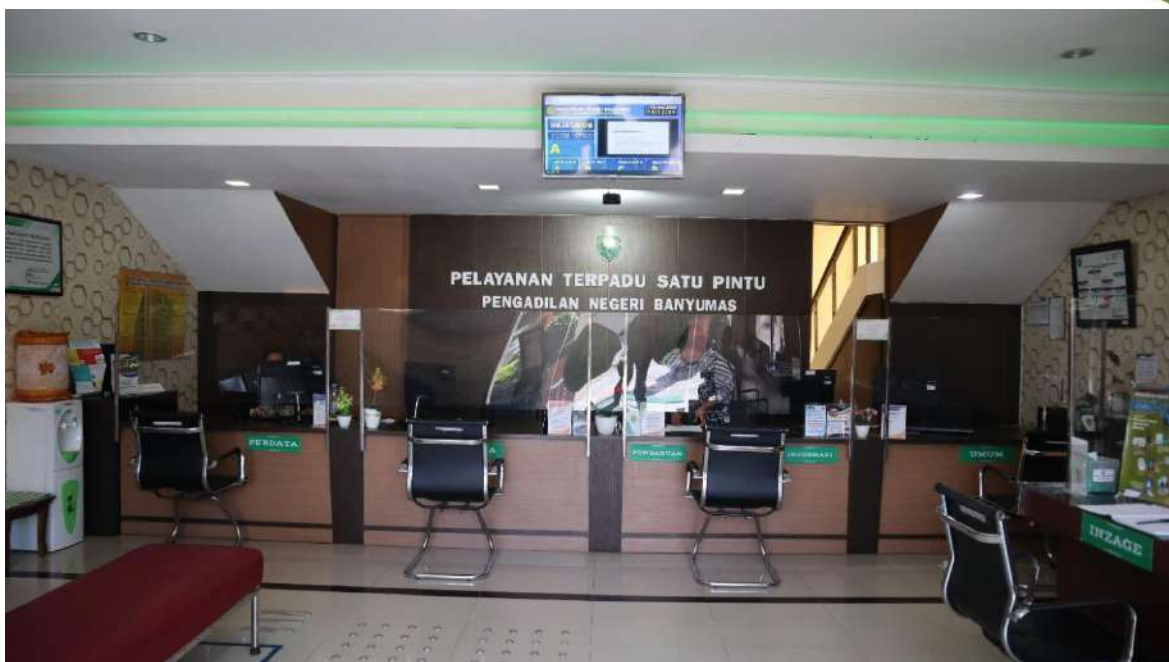
14. E-berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.



15. Layanan Disabilitas









Layanan disabilitas di Pengadilan Negeri Banyumas merupakan layanan yang bertujuan untuk membantu mendukung seorang difabel didalam beraktifitas terutama pada saat di Pengadilan Negeri Banyumas.

BAB VI

Pengawasan

A. Internal

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita serta seluruh pegawai. Pengawasan mempunyai ruang lingkup tidak hanya pada pelaksanaan tugas yang menyangkut penyelenggaraan peradilan melainkan juga meliputi pelaksanaan penanganan administrasi baik administrasi perkara maupun penanganan administrasi umum serta tingkah laku dan perbuatan para pejabat dan para pegawai pengadilan baik tingkah laku dalam dinas maupun diluar dinas. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas tersebut perlu diingat bahwa penentu keberhasilan suatu organisasi adalah adanya tata kerja dan manajemen yang mantap. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan realistis, pengorganisasian yang jelas, tanggung jawab yang akan mempermudah penyelesaian tugas, kendala-kendala yang muncul dan kekurangan yang terjadi akan dapat ditentukan dalam sistem pengawasan yang memadai dan ketat, tetapi harus luwes.

Sistem pengawasan itu sendiri harus mampu memerankan fungsi ganda yaitu disatu sisi sebagai sarana penegak dan penangkal kekeliruan, pada dasarnya hakekat pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dengan demikian fungsi pengawasan harus mampu menciptakan situasi kondusif terhadap penegakan disiplin serta peningkatan produktifitas dan etos kerja. Pengawasan memerlukan sentuhan kepemimpinan yang berwibawa dan berdedikasi tinggi sehingga mendorong personil yang handal dan terampil.

Pengadilan Negeri Banyumas menerapkan sistem pengawasan berjenjang yang dilakukan dengan rapat bulanan tiap Sub Sagian maupun Kepaniteraan dengan Hakim Pengawas masing-masing. Terdapat juga rapat khusus Kesekretariatan dan Kepaniteraan serta rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh hakim, pejabat struktural, maupun pegawai di Pengadilan Negeri Banyumas.

B. Evaluasi

Dalam rangka mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Kredibel, dan transparan Mahkamah Agung sudah menjalankan amanat undang-undang dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan meliputi:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Banyumas sudah melakukan Pembinaan dan Pengawasan di jajarannya dalam rangka Pelayanan Yang Prima bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Telah terwujudnya administrasi peradilan yang terbuka, akuntabel, dan telah terlaksananya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkara.

BAB VII

Penutup

A. Kesimpulan

Untuk mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Agung, harus didukung oleh profesionalisme aparat peradilan dan SDM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara transparan dan akuntabel dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat maka diperlukan keikutsertaan seluruh pihak Pengadilan Negeri yang diarahkan oleh Ketua dengan baik.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja perlu penambahan anggaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kinerja seperti pengadaan meubelair, sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dengan diadakannya pelatihan yang berkelanjutan bagi para pegawai yang mempunyai potensi dan adanya jenjang karier yang jelas bagi pegawai Mahkamah Agung.